



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadlansyah Lubis

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan

ttd.

Pramono Anung

ttd.

Fadlansyah Lubis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|--------------------|
| 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri | Rp1.100.000.000,00 |
| 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara | Rp993.000.000,00 |
| 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional | Rp1.093.000.000,00 |

4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi
dan Informatika Rp940.000.000,00

Total Anggaran Rp4.126.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan

ttd.

Fadlansyah Lubis



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Murbaningsih
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Agustina Murbaningsih

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|--------------------|
| 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha | Rp990.000.000,00 |
| 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan | Rp1.170.000.000,00 |
| 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri | Rp990.000.000,00 |

4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp990.000.000,00

Total Anggaran Rp4.140.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

ttd.

Agustina Murbaningsih



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

ttd.

Pramono Anung

ttd.

Surat Indrijarso

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|------------------|
| 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp990.000.000,00 |
| 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Rp880.000.000,00 |
| 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp875.000.000,00 |

4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
di Bidang Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Rp880.000.000,00

Total Anggaran Rp3.625.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

ttd.

Surat Indrijarso



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Satya Bhakti Parikesit

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|--------------------|
| 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp950.000.000,00 |
| 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp1.182.000.000,00 |
| 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan | Rp950.000.000,00 |

| | |
|--|--------------------|
| 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim | Rp950.000.000,00 |
| Total Anggaran | Rp4.032.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,

ttd.
Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman,

ttd.
Satya Bhakti Parikesit



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Yuli Harsono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas | 1. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet | 100% |
| | | 2. Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% |
| | | 3. Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah | 100% |
| | | 4. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan | 100% |
| | | 5. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|--------------------|
| 1. Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | Rp4.000.000.000,00 |
| 2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | Rp2.000.000.000,00 |
| 3. Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan | Rp3.000.000.000,00 |

4. Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden Rp3.000.000.000,00

Total Anggaran

Rp12.000.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

ttd.

Yuli Harsono



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Farid Utomo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|---------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet | 1. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet | 90% |
| | | 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet | WTP |
| | | 3. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet | B (70) |
| | | 4. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet | BB (77) |
| | | 5. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet | 86 |

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp2.276.706.000,00 |
| 2. Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp114.452.511.000,00 |
| 3. Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan | Rp6.404.000.000,00 |

4. Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan, Pengelolaan
Barang Milik Negara, Pemeliharaan,
Perlengkapan dan Jamuan Pelayanan Umum
Lainnya di Lingkungan Sekretariat kabinet Rp32.319.632.000,00

Total Anggaran Rp155.452.849.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi

ttd.

Pramono Anung

ttd.

Farid Utomo



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Amperawan
Jabatan : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat

ttd.

Pramono Anung

ttd.

M. Amperawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Terhadap Isu Strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|------------------|
| 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp338.400.000,00 |
| 2. Rapat Koordinasi Staf Ahli di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Rp1.000.000,00 |
| 3. FGD/Diskusi Terbatas | Rp60.600.000,00 |
| Total Anggaran | Rp400.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat

ttd.

M. Amperawan



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasit Saronto

Jabatan : Staf Ahli Bidang Komunikasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Komunikasi

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Wasit Saronto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Terhadap Isu Strategis di Bidang Komunikasi | Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|------------------|
| 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp339.150.000,00 |
| 2. Rapat Koordinasi Staf Ahli di Bidang Komunikasi | Rp1.000.000,00 |
| 3. FGD/Diskusi Terbatas | Rp59.850.000,00 |
| Total Anggaran | Rp400.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Komunikasi

ttd.

Pramono Anung

ttd.

Wasit Saronto



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Y. Raso

Jabatan : Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

ttd.

ttd.

Pramono Anung

M.Y. Raso

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Terhadap Isu Strategis di Bidang Reformasi Birokrasi | Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|------------------|
| 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp338.400.000,00 |
| 2. Rapat Koordinasi Staf Ahli di Bidang Reformasi Birokrasi | Rp1.000.000,00 |
| 3. FGD/Diskusi Terbatas | Rp60.600.000,00 |
| Total Anggaran | Rp400.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

ttd.
Pramono Anung

ttd.
M.Y. Raso



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thanon Aria Dewangga
Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan
Internasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Hukum dan
Hubungan Internasional

ttd.

ttd.

Pramono Anung

Thanon Aria Dewangga

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| | (1) | (2) | (3) |
| | Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Terhadap Isu Strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional | Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|------------------|
| 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp349.350.000,00 |
| 2. Rapat Koordinasi Staf Ahli di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional | Rp1.000.000,00 |
| 3. FGD/Diskusi Terbatas | Rp49.650.000,00 |
| Total Anggaran | Rp400.000.000,00 |

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Pramono Anung

Jakarta, 10 Januari 2017
Pihak Pertama,
Staf Ahli Bidang Hukum dan
Hubungan Internasional

ttd.

Thanon Aria Dewangga